

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian di Indonesia. Saat ini, sektor perbankan telah mendominasi industri keuangan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perbankan memegang peran yang penting dalam menjaga stabilitas dan menciptakan ketahanan ekonomi berkelanjutan.

Di Indonesia, sektor perbankan masih mendominasi sistem keuangan nasional dengan kapitalisasi aset lebih dari 50 persen dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Jika dilihat berdasarkan nilai aset sektor perbankan menunjukkan nilai yang stabil (OJK, 2020). Sebagai salah satu bagian dari industri perbankan nasional, keberadaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) diharapkan mampu mendorong perekonomian daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962. Jika dicermati lebih lanjut performa Bank Pembangunan Daerah (Tabel 1.1.), kinerja pertumbuhan komponen keuangan utama BPD masih fluktuatif, sementara daya saing BPD dilihat dari kapitalisasi kinerja usahanya dibandingkan industri perbankan secara umum juga masih tergolong stagnan dan relatif rendah, yaitu berkisar pada angka 7 persen hingga 8 persen sejak tahun 2014.

Tabel 1. 1. Kinerja & Market Share BPD terhadap Perbankan

Kinerja	Periode					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kinerja Pertumbuhan (%) YoY						
Kredit	14,02	9,03	8,97	9,49	8,29	10,21
DPK	16,77	6,14	7,55	17,17	6,25	11,47
Aset	13,34	9,21	9,74	9,77	9,21	6,13
Market Share (%)						
Kredit	8,16	8,06	8,14	8,23	7,95	8,26
DPK	8,17	8,08	7,93	8,50	8,48	8,87
Aset	7,85	7,76	7,87	8,19	8,13	8,38

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020.

Namun ditengah dominasi sektor perbankan terhadap perekonomian nasional, berbagai penelitian menyatakan bahwa eksistensi BPD terhadap perekonomian nasional khususnya perekonomian daerah masih tergolong rendah (Alfriska & Haryani, 2011; Fettry *et al*, 2018; Lisdayanti *et al*, 2013). Kinerja intermediasi BPD diamati dari *loan to deposit ratio* (LDR) cenderung memiliki skor yang lebih rendah dibandingkan industri perbankan nasional. Rasio kredit bermasalah BPD diamati dari rasio *Non Performaing Loan* (NPL) cenderung lebih tinggi dibandingkan industri perbankan nasional. Kinerja permodalan BPD diamati dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) meskipun terbilang memadai, namun masih relatif rendah untuk mendukung ekspansi bisnis dan peningkatan daya saing BPD dalam industri keuangan nasional. Sementara kinerja rentabilitas BPD diamati dari rasio *Return on Asset* (ROA) cenderung mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dimana cenderung mengalami peningkatan yang berdampak terhadap penurunan rasio *Net Interest*

Margin (NIM). Hal tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa aktivitas operasional BPD cenderung didominasi oleh sumber pendanaan tinggi bunga yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kinerja BPD secara keseluruhan apabila tidak dikelola dengan baik.

Belum maksimalnya eksistensi BPD terhadap industri perbankan nasional juga tampak dari kinerja *market share* BPD yang terbilang rendah diantara industri perbankan nasional. Rendahnya kinerja *market share* BPD mengindikasikan bahwa daya saing BPD secara relatif terhadap kinerja perbankan umum nasional dalam industri tergolong masih rendah. Sebagai salah satu lembaga keuangan di daerah, eksistensi BPD dalam perekonomian regional memiliki peran yang sangat strategis, khususnya dalam mendorong perekonomian daerah melalui penyediaan produk dan layanan jasa keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sosial dan ekonomi di mana BPD tersebut beroperasi. Selain itu, peran BPD sebagai *financial advisor* dan pengelola dana pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang menjadikan BPD memiliki peran strategis dan fundamental bagi perekonomian daerah. Mengingat pentingnya peran dalam perekonomian, oleh karena itu BPD harus memiliki kinerja yang optimal untuk mendukung aktivitas pembangunan di daerah serta meningkatkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Salah satu yang menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja perusahaan tak terkecuali pada industri perbankan adalah tingkat efisiensi. Efisiensi industri perbankan dapat dicermati dari sisi mikro maupun makro yang mengarah pada kemampuan perbankan untuk dapat bertahan dalam kondisi persaingan produk

dan layanan yang semakin ketat, serta kemampuan perbankan dalam mengalokasikan sumber daya keuangan untuk meningkatkan aktivitas investasi yang dapat mendorong perekonomian (Berger & Humprey, 1997).

Efisiensi secara harfiah diartikan sebagai upaya dalam meminimalisir biaya untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Berbagai literatur tentang efisiensi pada lingkup perbankan seringkali diukur dengan pendekatan non parametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA) (Anouze & Bou-Hamad, 2019; Hendrawan, 2020; Kumar, 2018; Othman *et al*, 2016; Titko *et al.*, 2014). Dalam melakukan estimasi, pendekatan DEA dianggap kurang informatif karena tidak mempertimbangkan komponen *error* atau menggunakan pendekatan matematis (Silva *et al.*, 2017; Zuhroh *et al.*, 2015) yang perlu dipertimbangkan dalam mengamati fenomena ekonomi yang dinamis. Untuk mengakomodir hal tersebut, terdapat pendekatan lain yang juga banyak digunakan dalam melakukan pengukuran tingkat efisiensi, yaitu pendekatan *Stochastics Frontier Analysis* (SFA), dimana dalam proses estimasinya juga mempertimbangkan *noise* statistik dari efek inefisiensi serta dapat menambahkan variabel diluar model (Sharif *et al*, 2019). Selain itu, pendekatan SFA juga dinilai lebih baik karena pengukurannya lebih didasarkan pada pengoptimalan ekonomi dari pada pengoptimalan teknis (Wardhani & Mongid, 2019).

Di Indonesia, literatur tentang efisiensi pada kelompok industri perbankan cenderung banyak dilakukan pada kelompok Bank Umum, seperti penelitian oleh Suhel, (2011); Maghyereh & Awartani, (2014); Widiarti *et al*, (2015); Mongid & Muazaroh, (2017). Penelitian lain oleh Kadang, (2018) yang menguji efisiensi

profit bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2016 melalui pendekatan intermediasi dan kegiatan bank menggunakan variabel ukuran bank, risiko kredit, likuiditas, kekuatan pasar, kecukupan modal dan nilai tukar rupiah menyatakan bahwa ukuran bank, kecukupan modal, risiko kredit, kekuatan pasar, serta nilai tukar secara signifikan berpengaruh pada efisiensi profit bank umum di Indonesia selama periode yang diamati. Penelitian lain oleh Subandi & Ghozali (2013) yang juga menguji tentang determinan efisiensi terhadap profitabilitas industri perbankan di Indonesia selama tahun 2006–2010 yang diasumsikan dengan nilai ROA menggunakan variabel jenis bank, rasio NPL, ukuran bank, rasio likuiditas (LDR), rasio kecukupan modal (CAR), biaya operasional atau beban usaha, dan NIM berpengaruh signifikan terhadap efisiensi perbankan, sementara rasio NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi perbankan.

Sedangkan kajian mengenai efisiensi biaya pada industri perbankan juga telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Adeabah & Andoh, (2020), Apriyana et al. (2015), Hartono (2009), Kumar (2018), dan Sokic (2015). Penelitian oleh Anwar (2019) yang dilakukan pada bank umum di Indonesia periode 2002 – 2010 yang merupakan periode pemulihan pasca krisis keuangan Asia dengan menggunakan variabel ukuran bank, ROA, kondisi permodalan (CAR), tingkat intermediasi (LDR), risiko kredit (NPL), tingkat inflasi, PDB, tingkat pengangguran, nilai tukar rupiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi profit perbankan di Indonesia selama periode amatan dipengaruhi oleh ukuran bank, profitabilitas yang diwakili oleh ROA, kecukupan modal, risiko

kredit, tingkat inflasi, PDB, tingkat pengangguran, dan nilai tukar rupiah, walaupun arah signifikansi antar variabel yang berpengaruh terhadap efisiensi biaya perbankan berbeda.

Sementara penelitian tentang efisiensi pada lingkup BPD diantaranya dilakukan oleh (Abidin, 2009; Puspasari *et al*, 2020; Sutanto, 2015; Zahra & Darwanto, 2019), yaitu mengukur kinerja efisiensi BPD dengan menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA). Hasil studi menyatakan bahwa sebagian besar BPD belum mampu untuk mencapai tingkat efisiensi optimal. Penelitian lain oleh (Sparta, 2017) menerangkan bahwasanya tidak ada BPD, bahkan satupun di Pulau Jawa yang mempunyai jumlah atau total aset lebih besar dibandingkan BPD di luar Pulau Jawa yang mendapatkan predikat BPD paling efisien di Indonesia.

Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Muazaroh & Eduardus (2012) terhadap kinerja efisiensi profit industri perbankan di Indonesia menyatakan bahwa walaupun secara umum perbankan di Indonesia belum efisien, namun kelompok BPD justru memiliki tingkat efisiensi profit yang paling baik diantara kelompok perbankan lainnya yang diteliti. Hal ini dikarenakan BPD memiliki tingkat *Net Interest Margin* (NIM) yang tinggi dengan tingkat *non-performing loan* (NPL) yang rendah.

Atas hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab inkonsistensi penelitian terutama dalam mengkaji efisiensi industri perbankan daerah dari sisi biaya maupun profit. Selain itu, urgensi penelitian ini terutama berdasar pada ruang lingkup efisiensi profit dan biaya dengan mempertimbangkan faktor

kepemilikan Layanan Keuangan Digital (LKD) pada industri BPD. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, BPD harus menghadapi persaingan yang ketat antar industri perbankan maupun non perbankan ditengah pesatnya perkembangan *financial technology*. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan BPD untuk mencapai tujuan sebagai industri perbankan yang berdaya saing tinggi dan kontributif bagi perekonomian regional maupun nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam menentukan arah kebijakan, khususnya dalam mencermati sumber utama inefisiensi yang dapat menurunkan kinerja BPD.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi biaya dan efisiensi profit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?
2. Apakah variabel Layanan Keuangan Digital, ukuran perusahaan, kecukupan modal, rasio LDR, rasio NPL, inflasi dan produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap efisiensi biaya pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?
3. Apakah variabel Layanan Keuangan Digital, ukuran perusahaan, kecukupan modal, rasio LDR, rasio NPL, inflasi dan produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap efisiensi profit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghitung dan menganalisis efisiensi biaya dan efisiensi profit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis Layanan Keuangan Digital, ukuran perusahaan, kecukupan modal, rasio LDR, rasio NPL, inflasi dan produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap efisiensi biaya pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis variabel Layanan Keuangan Digital, ukuran perusahaan, kecukupan modal, rasio LDR, rasio NPL, inflasi dan produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap efisiensi profit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan dan identifikasi kebijakan internal, proses pengelolaan perbankan dan pengawasan bank untuk meningkatkan efisiensi kegiatan perbankan.
2. Bagi akademisi dan penulis, penelitian ini dapat memberikan serta menambah wawasan mengenai efisiensi biaya serta profit pada Bank

Pembangunan Daerah, dan dapat menambah referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian serupa kedepannya.